

IMPLEMENTASI STRATEGIK PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Hasriani^{1*}, Muhammadiyah², Hafiz Elfiansyah Parawu³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out how the strategy of the regional development planning agency in implementing the city without slum program (KOTAKU) in Makassar City Regional development planning agency. The number of informants in this study was 7 people. The results showed that the strategic implementation of city program without slums (KOTAKU) at the Makassar city regional development planning agency office was already running in accordance with the applicable standard operating program procedures. This seen from the four indicators, namely effectiveness and efficiency, organizational structure, leadership, motivation, in this case the city program had been implemented in 127 villages in Makassar based on criteria, namely light slum, moderate slum, and heavy slum. The implementation of the program by the Makassar city regional Development planning agency related to the KOTAKU program had been running since the beginning of 2015 until now and had entered the 60% achievement that carried out well.

Keywords: *implementation, strategy, city, slum*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengimplementasian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Makassar. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan implementasi strategik program kota tanpa kumuh (KOTAKU) pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategik Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur program yang berlaku. Hal ini dilihat dari keempat indikator yaitu efektifitas dan efisiensi, struktur organisasi, kepemimpinan, motivasi dalam hal ini telah melakukan implementasi Program KOTAKU di 127 kelurahan di Kota Makassar berdasarkan 3 kriteria yakni kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Pelaksanaan program oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Makassar terkait program KOTAKU telah berjalan sejak awal tahun 2015 hingga kini dan sudah memasuki pencapaian 60% telah terlaksana dengan baik.

Kata kunci: Implementasi, strategi, kota, kumuh

* hasriani@gmail.com

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) adalah perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya serta mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi penilaian pelaksanaan rancangan Pembangunan Daerah (PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017).

Adapun tugas dari Bappeda Kota Makassar yaitu membantu Gubernur/Bupati/ walikota dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta menjalankan rumusan kebijakan perencanaan Daerah, mengkoordinasikan penyusunan rancangan yang memuat visi, misi, target, strategi, program kebijakan, serta kegiatan pembangunan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bappeda sebagai badan pelaksana pembangun dalam menjalankan serta melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan belum berjalan dan berproses secara optimal, hal ini diakibatkan terjadinya peningkatan penduduk setiap tahunnya sehingga pembangunan tidak merata. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu permasalahan publik yang menimbulkan dampak, yaitu sulitnya pemenuhan tempat tinggal yang layak

bagi penduduk. Hal ini disebabkan karena terbatasnya wilayah di daerah perkotaan untuk dilakukan pembangunan pemukiman yang layak. Kondisi seperti ini sangat banyak dijumpai khususnya diwilayah perkotaan.

Berkaitan dengan masalah tersebut Bappeda Kota Makassar melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Penanganan kawasan pemukiman kumuh merupakan kegiatan prioritas strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, yaitu 0 persen pemukiman kumuh perkotaan di tahun 2019. Dalam pelaksanaannya penanganan kawasan kumuh memerlukan pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman, baik dari segi perumahan maupun kawasan pemukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tuntutan akan penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan pemukiman semakin meningkat. Dalam penanganannya Pemerintah Kota Makassar tengah mengoptimalkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan menyoar enam kawasan kumuh yang diprioritaskan untuk dibenahi. Kawasan yang akan dilakukan penanganan terbagi tiga

kategori yaitu kategori kumuh ringan yakni kawasan Wajo meliputi Kelurahan Melayu Baru, Butung, dan Ende.

Sementara kategori kumuh sedang, Daerah Aliran Sungai Jeneberang, meliputi Kelurahan Balang Baru, Tanjung Merdeka, Parang Tambung, Bantaran Kanal Pannampu, Rappocini Maricaya Baru, Bara-Baraya, Bara-Baraya Selatan, Maradekaya Utara, Barana, Maccini Gusung, Tompo Balang, dan Bantaran Kanal Jongaya, Sambung Jawa, Bonto Rannu, Tamarunang, Maccini Sombala. Terakhir kategori tinggi, Pelabuhan Baru, meliputi Cambaya, Gusung, Pattigalloang, Buloa, Kaluku Bodoa, Tallo. Dan Wiayah Kecamatan Mariso meliputi Kampung Buyang, Lette, Pannambungan, dan Mariso. Bappeda Kota Makassar telah meraih beberapa penghargaan beberapa tahun kebelakang, yaitu penghargaan perencanaan pembangunan terbaik di tahun 2018. Dan yang terbaru penghargaan dalam bidang implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diberikan langsung kepada Kepala Bappeda Kota Makassar. (PORTAL RESMI KOTA MAKASSAR 16/10/2019).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui masalah yang berkenaan dengan penerapan manajemen strategik dan pembangunan daerah. Masalahnya Yaitu apakah penggunaan sumber daya di Kantor Bappeda Kota Makassar digunakan dengan baik, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan berjalan secara optimal atau tidak. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam dan membuktikan kebenaran dengan adanya fakta-fakta yang terjadi di Kantor Bappeda Kota Makassar.

Menariknya penelitian ini karena mengetahui yang dapat dijadikan sebagai indikator terkait penerapan manajemen strategik dan pembangunan daerah, sehingga dapat mengetahui sejumlah indikator tersebut dalam pengimplementasian strategi pada satu program khususnya program yang di canangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, termasuk di Kota Makassar yang di tangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Dengan adanya program ini maka dapat diketahui bagaimana implementasi strategik Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Makassar.

Manajemen strategik yaitu suatu seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan dan keputusan yang membuahkan hasil formulasi dan implementasi rencana-rencana yang dirancang. Manajemen strategik yaitu suatu seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan dan keputusan yang membuahkan hasil formulasi dan implementasi rencana-rencana yang dirancang. Dirgantoro (2001:9) Manajemen strategik merupakan suatu serangkaian keputusan serta tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi berkelanjutan. Hunger dan Wheelen (2003: 4). Menurut Siagian (2007: 76) Manajemen strategik yaitu kumpulan aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya berfokus dan

komprehensif, serta menetapkan cara pelaksanaannya, yang dilakukan oleh pimpinan dan diterjemahkan oleh kelompok yang ada di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi yaitu untuk melihat strategi terlaksana sebagaimana mestinya atau tidak, manajemen mutlak perlu melakukan tiga jenis tindakan, yaitu melakukan pengawasan, membuat penilaian dan menciptakan suatu sistem umpan balik Siagian (2012:257). Menurut Winardi dalam makmur (2009: 9) menyatakan bahwa dalam hal pencapaian tujuan organisasi dilihat dari faktor manusia karena hanya manusia yang mampu membuat, merubah dan mengembangkan suatu rencana manajemen yang lebih akurat didalam pengimplementasian mengarah kepada pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berdaya hasil.

Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program KOTAKU adalah seluas 23.656 Hektare. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program KOTAKU akan melakukan

peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Tahapan pelaksanaan Program KOTAKU adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat

membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Program KOTAKU ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. BKM ini “direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh.

Sifat dan skala kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman, berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang merugikan. Oleh karena itu dalam Program KOTAKU setiap usulan kegiatan pembangunan yang memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak (UU No. 32 Tahun 2009). Sumber

pembiayaan Program KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Taufiqurokhan dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Strategik*" (2016:54) berpendapat bahwa ada 4 (empat) elemen dasar Implementasi Strategi yakni : (1) Efektifitas Dan Efisiensi implementasi strategi dari suatu program atau kegiatan di anggap efektif jika hasil yang dicapai berkesesuaian dengan yang di inginkan/direncanakan atau sesuai dengan tujuan utama dari program atau kegiatan Terkait, dan di anggap efisien jika segenap sumber daya yang di gunakan (manusia, dana, waktu, dan lain-lain) dapat di manfaatkan semaksimal mungkin, (2) Struktur Organisasi implementasi strategi dari suatu program atau kegiatan yang memerlukan pertimbangan dalam penyusunan struktur organisasi , karena keselarasan struktur organisasi dengan strategi yang di gunakan merupakan hal penting demi suksesnya implementasi strategi. Struktur organisasi dalam suatu program atau kegiatan harus di susun sebaik mungkin dengan menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing, (3)

kepemimpinan yang baik sangat di butuhkan guna suksesnya implementasi strategi dari suatu program atau kegiatan. Berhasil tidaknya implementasi strategi pada suatu program atau kegiatan tergantung dari pemimpin yang mengepalai kegiatan terkait, (4) Motivasi dalam implemntasi strategi dari program atau kegiatan sangat di butuhkan untuk menjaga dan menambah semangat kerja personil. Peran Pemimpin adalah yang menjadi utama dalam menjaga hubungan dengan bawahannya sehingga terjalin hubungan yang harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli sampai september 2020 Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Atas dasar pertimbangan bahwa merupakan salah satu unsur pemerintah tingkat Kota yang menaungi dan menangani sistem Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar, termasuk Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh. Adapun informan penelitian yang terdiri dari 7 orang dan teknik analisa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta

terdokumentasi sebagai pendukung dari penelitian. Data yang diperoleh dari lokasi adalah data primer yaitu data empiris yang diperoleh oleh informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Jenis data primer yang ingin diperoleh adalah mengenai informasi penelitian mengenai Implementasi Strategik Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bappeda merupakan lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena sistem ini sudah dimulai sejak kemerdekaan diproklamirkan.

Hal ini dilandasi oleh pemikiran para ahli ekonomi dan politik nasional waktu itu bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat hanya diserahkan kepada mekanisme pasar saja sebagaimana banyak dilakukan

oleh negara-negara yang menganut paham ekonomi liberal. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengendalian ekonomi dan proses pembangunan nasional daerah. Namun demikian, peranan pemerintah tersebut perlu dilakukan secara sistematis melalui pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan.

Penerapan sistem perencanaan pembangunan di Indonesia dimulai pada tanggal 12 April 1947 dengan dibentuknya oleh Presiden Republik Indonesia *Panitia Pemikir Siasat Ekonomi* yang disebut juga sebagai “*Brain Trust*”. Kemudian, panitia ini berhasil menyusun landasan perencanaan pembangunan pertama di Indonesia yang di beri judul: *Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia* yang merupakan landasan dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih rinci. Panitia ini diketuai oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan tiga orang wakil ketua yaitu A.K, Gani, Mohammad Roem, dan Sjafruddin Perwiranegara.

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar

penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU.

Cara memahami kekumuhan yang hanya berdasarkan pada permasalahan fisik spasial (“spatial problem-based”) semata hanya akan mampu memposisikan kumuh sebagai “current well-being” yang memandang kumuh

sebagai sesuatu yang harus dipisahkan dari sistem penataan ruang yang direncanakan. Perspektif pemahaman kumuh yang memosisikannya sebagai “future well-becoming” akan mampu menggali status/kondisi dan potensinya sebagai dasar penentuan kriteria dan indikator program intervensinya. Untuk itu diperlukan paradigma baru yang bergeser dari pendekatan yang berbasis fisik-spasial ke pendekatan yang menggunakan basis pemenuhan kesejahteraan rakyat dalam bidang pemenuhan hak atas papan. Selain itu, pada tataran tata kelola, orientasi pelaksanaan/implementasi yang selama ini lebih banyak berorientasi pada “rule-based” harus dipadukan dengan pendekatan yang berorientasi pada “outcome-based”. Hal ini akan menjawab pemecahan masalah yang sering terjadi yaitu ketidaktepatan sasaran implementasi dan terlalu ‘rigid’ nya kebijakan sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara cerdas dan sering ‘menjadi bumerang’ pada pada pelaksanaannya.

Secara singkat, dua kata kunci yang diusulkan untuk mendorong akselerasi penanganan kawasan kumuh adalah, yang pertama “paradigma baru” yang memposisikan hak warga dalam bermukim sebagai basis kebijakan penanganannya dan yang kedua adalah

“peningkatan kapasitas (capacity building) para pemangku kewajiban” dalam pemenuhan hak tersebut. Kedua kata kunci tersebut merupakan langkah konsolidasi kebijakan yang menguatkan dan merestrukturisasi (strengthening dan restructuring) pola intervensi/program penanganan yang selama ini sudah dilakukan.

Efektifitas Dan Efisiensi

Implementasi strategi dari suatu program atau kegiatan di anggap efektif jika hasil yang dicapai berkesesuaian dengan yang di inginkan/ direncanakan atau sesuai dengan tujuan utama dari program atau kegiatan Terkait, dan di anggap efisien jika segenap sumber daya yang di gunakan (manusia, dana, waktu, dan lain-lain) dapat di manfaatkan semaksimal mungkin. Kaitannya dengan Program KOTAKU tentunya berdasarkan dari sumber yang menagani langsung program ini. Dengan Indikator di atas adapun beberapa pernyataan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada Ketua Bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah Kota Makassar.

Berdasarkan informasi dari informan-informan tentunya memberikan penguatan pada informasi sebelumnya yang di berikan oleh

BAPPEDA Kota Makassar karena melihat informasi tersebut tidak terlepas dari apa yang di sampaikan pihak pemerintah, meskipun terdapat beberapa hal yang tentunya menjadi fokus pada Program KOTAKU seperti daerah Kumuh ringan, Kumuh sedang dan Kumuh Berat pihak yang menangani program ini tentunya bekerja semaksimal mungkin karena daerah yang menjadi sasaran di makassar itu sangat banyak mencapai 127 kelurahan yang ada di Kota Makassar tentunya membutuhkan dana dan sumber daya yang besar sehingga pemerintah yang menangani program KOTAKU melaksanakan program ini secara bertahap dan memakan waktu yang panjang, pada masa evaluasi di 5 tahun program berjalan sesuai rencana karena memberikan perubahan di beberapa titik sasaran yang menjadi fokus program KOTAKU, karena adanya perubahan yang signifikan maka pemerintah terus menjalankan program ini sampai mencapai tujuan utamanya sekalipun memakan waktu yang panjang. Program ini adalah program dari pemerintah pusat yang menjadi program NASIONAL, namun makassar sendiri menerima program ini di akhir tahun 2014 namun mulai di jalakan sejak awal tahun 2015 hingga kini. Terlepas dari lamanya program ini BAPPEDA Kota

Makassar yang menangani program ini menyampaikan beberapa sumber dana yang menjadi sumber dana pada program ini yakni dari pinjaman luar negeri lembaga donatur, itu bantuan dari Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Sedangkan jumlah SDM mereka sendiri tidak dapat memastikan sampai ke bawah karena BAPPEDA Kota Makassar sendiri adalah selaku badan atau dinas yang mengawasi Program ini jadi mereka hanya mengurus administrasi program serta mengevaluasi program sedakna yang menjalankan adalah fasilitator yang ada di kelurahan yang menjadi sasaran program yang jumlahnya mencapai 127 orang fasilitator berdasarkan jumlah kelurahan. Sehingga jika di kaitkan dengan teori umum Manajemen strategik tentu saja sangat relevan karena dalam menjalankan program KOTAKU tentu ada perumusan program, pengimplementasian, serta evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan Bappeda kota Makassar mencapai tujuannya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afwa Ulya pada tahun 2018 mengenai partisipasi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dapat dilihat bahwa efektifitas dan efisiensinya waktu serta tenaga sangatlah menjadi point penting dalam menja;ankan program ini sehingga di kota Makassar sendiri itu mencontoh dearah daerah yang menjalankan program ini namun memiliki kedala masalah waktu dan tenaga inilah yang menjadi evaluasi tersendiri yang tentunya sudah di siapkan oleh pemerintah kota Makassar agar bagaimana memanagerial ektifitas waktu serta efisiensi SDA dan SDM di kota makassar itu lebih cepat dan tepat waktu serta tepat sasaran di kota Makassar.

Struktur Organisasi

Implementasi strategi dari suatu program atau kegiatan yang memerlukan pertimbangan dalam penyusunan struktur organisasi, karena keselarasan struktur organisasi dengan strategi yang di gunakan merupakan hal penting demi suksesnya implementasi strategi. Struktur organisasi dalam program KOTAKU di Kota Makassar tentunya di susun sebaik mungkin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dengan menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan

perencanaan yang sudah ada. Dengan Indikator di tersebut adapun pernyataan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada 2 narasumber yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan informasi dari informan tentu memberikan penguatan Program berdasarkan indikator Struktur organisasi kita dapat melihat apa yang yang disampaikan oleh narasumber tentunya memberikan penguatan sesuai dengan apa yang ada dari pusat. Program KOTAKU sendiri adalah Program Nasional yang Strukturnya di tentukan oleh Pemerintah Pusat yang mengelola Program ini berdasarkan Rekomendasi dari Pusat Pemerintah Kota Makassar hanya menempatkan SDM sesuai dengan Posisi yang sudah di tetapkan dari pusat berdasarkan kemampuan SDM tersebut. Jadi Untuk Program KOTAKU sendiri tentunya di lakukan secara strukturan dan terarah sesuai tujuan utamanya, seperti di Kota Makassar program KOTAKU di Berikan wewenang kepada BAPPEDA untuk mengelola dan mengawasi program ini, dalam hal ini jika di kaitkan dengan Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten yang di kenal dengan model implementasi kesesuaian program,

adanya model ini dapat kita lihat bahwa model ini sangat sesuai dengan program KOTAKU di Kota Makassar karena dalam model ini ada 3 komponen penting dalam menjalankan suatu program yakni Program, Organisasi, dan Pemanfaat di mana di dalamnya ada tentu ada output serta tugas yang menjadi hal penting, tidak terlepas dari model ini bahwa Organisasi menjadi unsur sangat penting sama halnya dalam program KOTAKU di Makassar itu sangat penting karena menjadi inti dalam menjalankan program serta terjcapainya program dapat di lihat dari seberapa besar juga dan seberapa sukses organisasi yang menjalankan program KOTAKU khususnya di Kota Makassar, pada indikator kedua ini tentu menjadi indikator sangat penting dalam mempertimbangkan berjalannya program KOTAKU di kota Makassar sehingga tujuan sasarannya tepat dan program berjalan sesuai target waktu dan anggaran juga tidak membengkak karena di tetapkan dalam suatu susunan organisasi yang sudah terstruktur agar dalam menjalankan program KOTAKU di kota Makassar tidak membuang banyak tenaga dan biaya serta memanfaatkan SDA dan SDM sebaik mungkin agar program KOTAKU berjalan dengan baik.

Kepemimpinan

Kepemimpinan yang baik sangat di butuhkan guna suksesnya implementasi strategi dari program yang di lakukan oleh pemerintah Kota Makassar yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berhasil tidaknya implementasi strategi pada program atau kegiatan ini tergantung dari pemimpin yang mengepalai kegiatan atau program ini.

Dengan Indikator tersebut adapun pernyataan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada 3 narasumber yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan informasi dari informan yang ada dapat memberikan penguatan Program berdasarkan indikator Struktur organisasi kita dapat melihat apa yang yang disampaikan oleh narasumber tentunya memberikan penguatan sesuai dengan apa yang ada dari pusat. Program KOTAKU sendiri adalah Program Nasional yang Strukturnya di tentukan oleh Pemerintah Pusat yang mengelola Program ini berdasarkan Rekomendasi dari Pusat Pemerintah Kota Makassar hanya menempatkan SDM sesuai dengan Posisi yang sudah di tetapkan dari pusat berdasarkan

kemampuan SDM tersebut. Jadi Untuk Program KOTAKU sendiri tentunya di lakukan secara strukturan dan terarah sesuai tujuan utamanya, seperti di Kota Makassar program KOTAKU di Berikan wewenang kepada BAPPEDA untuk mengelola dan mengawasi program ini.

Berdasarkan informasi dari informan-informan di atas memberikan penguatan Program berdasarkan indikator kepemimpinan kita dapat melihat apa yang yang disampaikan oleh narasumber tentunya memberikan penguatan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Program KOTAKU di kota Makassar sudah setengah dekade berjalan itu tidak terlepas dari faktor kepemimpinan pada setiap SDM yang terlibat di dalamnya mulai dari tingkat Nasional hingga ke daerah karena fungsi pemimpin sangat penting dalam menjalankan suatu program dan juga orang yang berjiwa kepemimpinan sangat di butuhkan untuk mengsucceskan program ini mulai dari atas hingga ke masyarakat yang menjadi sasaran program. Dengan ada faktor kepemimpinan yang baik maka dapat pula terjalin hubungan yang harmonis antar SDM baik dari Bappeda maupun Stakeholder lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Makassar tentu dalam

menjalankan Program ini pimpinan tidak terlepas dari konsep Program KOTAKU. Program KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Dimana program ini sangat membutuhkan orang yang berkompeten dalam mengelolah dan menjalankan konsep KOTAKU di kota Makassar, khususnya Pemimpin dalam hal membangun *Platform* kolaborasi tentunya peran pemimpin sangat berpengaruh dalam penanganan daerah yang kumuh termasuk dalam meningkatkan kerjasama datara pemerintah pusat dan daerah serta kerjasama yang baik atar masyarakat agar program terlaksana dengan baik, pada dasarnya pemimpin adalah unsur penting yang mengelolah dan menentukan dalam pengambilan keputusan pada suatu organisasi tentunya tidak terlepas pula dengan Program KOTAKU Khususnya di kota Makassar sangat di butuhkan peran seorang pemimpin baik dalam hal pelaksanaan Program Maupun pendekatan secara emosional agar menjadi hal yang mampu menunjang terlaksananya Program dengan baik dan mampu mencapai tujuannya.

Motivasi

Motivasi dalam implementasi strategi pada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Makassar sangat di butuhkan untuk menjaga dan menambah semangat kerja personil, maka dari itu Peran seorang Pemimpin kepada bawahannya tentu menjadi hal yang utama dalam menjaga hubungan dengan bawahannya sehingga terjalin hubungan yang harmonis, sehingga motivasi pada personil dapat terbangun. Dengan Indikator di atas adapun pernyataan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada narasumber yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai seperti apa bentuk Motivasi yang di berikan kepada SDM terkait program KOTAKU di Kota Makassar mengatakan tentunya memberikan motivasi kepada semua elemen yang terlibat baik secara struktural maupun tidak. Secara struktural tentunya memberikan arahan langsung dari kepaladinas ke pada seluh anggotanya agar menjalankan tugas dengan baik dengan memberikan motivasi dalam bentuk moril ataupun materi. Adapun yang menjadi tingkat kesulitan dalam pemberian motivasi

khususnya yang terkait dengan Program KOTAKU adalah memberikan motivasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran program KOTAKU karena di perlukan berbagai tahap untuk kemudian berlanjut mendukung program KOTAKU di kota Makassar, selanjutnya di lakukan motivasi agar tetap mendukung program ini sehingga tujuan utama dari Program KOTAKU terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, jika di kaitkan dengan penelitian yang di lakukan oleh Asteryna Anandita, Moch Saleh Soeaidy, Minto Hadi pada tahun 2015 tentang pelaksanaan pembangunan sarana prasana lingkungan sebagai wujud program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang yang menunjukkan keberhasilan tentu tidak terlepas dari unsur pelaksana program yang mampu memberikan motivasi-motivasi kepada SDM baik dari pelaksana program maupun masyarakat sebagai sasaran program tentunya memberikan itikad baik sehingga pada penelitian tersebut masyarakat sangat mendukung dan bahkan menginginkan program pemberdayaan berkelanjutan di daerahnya karena sangat membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM di wilayah tersebut, sama halnya di kota Makassar Program KOTAKU yang sudah berjalan sejak awal 2015

lalu tentunya tidak terlepas dari peran pelaksana Program memberikan motivasi kepada semua SDM yang terlibat baik dari pihak pelaksana maupun pihak masyarakat sebagai sasaran program sehingga selama program ini berjalan sudah mencapai 60% pencapaian target program, tentunya Motivasi adalah hal yang tidak bisa terlepas dari unsur pembangunan.

Sesuai dengan tujuan penulis kita dapat melihat bahwa di kota Makassar Program KOTAKU sudah berjalan sejak awal tahun 2015 hingga hari ini tentunya memberikan perkembangan yang pesat untuk kota makassar khususnya di 127 kelurahan yang menjadi sasaran program KOTAKU, dalam hal ini tentu saja masyarakat dari 127 kelurahan diberikan keuntungan secara luas baik dari segi infrastuktur hingga masyarakat secara pribadi. Program KOTAKU pada dasarnya sangat menunjang kemajuan secara objektif khususnya Kota makassar sendiri karena mengurangi daerah-daerah yang di anggap kumuh atau kotor, maka dengan adanya program KOTAKU di Kota Makassar tentu memberikan hal positif kepada pihak pemerintah maupun masyarakat sehingga tidak ada pihak yang di rugikan karena di rencanakan secara matang dan terukur. Dengan adanya

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar tentu sangat berperan penting menjadi stakeholder utamanya yang mengawasi agar tidak ada pihak yang dirugikan serta mengawasi suksesnya Program KOTAKU di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Strategik Program Kota Tanpa Kumuh Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dalam Hal ini dapat di kaitkan dengan Teori Taufiqurokhman di Mana terdapat 4 indikator yaitu: Efektifitas dan Efisiensi, Struktur Organisasi, Kepemimpinan, Motivasi. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dalam konteks implementasi strategi yang dapat di simpulkan adalah bagaimana Bappeda Kota Makassar menjadi Stakeholders utama dalam menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar, dengan adanya program ini di Kota makassar sangat membantu daerah-daerah yang wilayahnya masuk dalam kategori kumuh, program ini di rencanakan di Makassar pada akhir tahun 2014 dan terealisasi di awal tahun 2015 hingga kini, selama 5 tahun berjalan program ini ada banyak perubahan yang terjadi di khususnya di Kota Makassar, dapat kita lihat dari

presentasi evaluasi yang mencapai 60% keberhasilan dari program ini. Berdasarkan data yang ada ada sekitar 127 Kelurahan di kota makassar yang menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh dimana terdapat banyak daerah kumuh mulai dari yang statusnya ringan hingga yang berat. Berdasarkan data yang ada sekitar 20-30 daerah yang menjadi daerah Kumuh Berat dan sisanya tergabung dari kumuh sedang dan kumuh ringan, dari beberapa daerah di atas Kumuh Berat Menjadi prioritas Pada Program Ini karena penanganannya lebih membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang kumuh ringan ataupun kumuh sedang sehingga proses kerja ini membutuhkan waktu jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Implementasi Strategik Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Efektifitas Dan Efisiensi yaitu implementasi strategi dari suatu program KOTAKU di anggap

efektif karena berkesesuaian dengan yang di inginkan serta direncanakan atau sesuai dengan tujuan utama dari program KOTAKU, dan di anggap efisien jika segenap sumber daya yang di gunakan (manusia, dana, waktu, dan lain-lain) dapat di manfaatkan semaksimal mungkin termasuk dalam menangani langsung program pemerintah Kota Makassar yakni program Kota Tanpa Kumuh yang di singka KOTAKU, pada konteks ini program KOTAKU sudah berjalan selama 5 tahun terakhir dan terlaksana dengan baik namun tetap membutuhkan jangka waktu yang panjang karena pada program ini membutuhkan waktu yang panjang karena melibatkan jumlah SDM dan SDA yang besar sehingga sampai hari ini telah terlaksana 60% dari pencapain target kegiatan, (2) struktur organisasi Implementasi strategi dari suatu program atau kegiatan yang memerlukan pertimbangan dalam penyusunan struktur organisasi termasuk dalam pelaksanaan program KOTAKU oleh BAPPEDA kota Makassar, karena keselarasan struktur organisasi dengan strategi yang di gunakan merupakan hal penting demi suksesnya implementasi strategi pada program KOTAKU di kota Makassar. Dalam hal ini pembentukan Struktur organisasi program Kota Tanpa

Kumuh di Kota Makassar di susun berdasarkan kebutuhan Program KOTAKU, pada pembentukan Struktur Organisasi di Bentuk Oleh Pemerintah Pusat Karena Program KOTAKU adalah Program Nasional yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di indonesia. Untuk di kota Makassar sendiri strukturnya di isi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi pada bidang yang di butuhkan untuk mengsucceskan program KOTAKU di Makassar dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (BAPPEDA) menjadi stakeholder utama yang menentukan dan mengisi struktur organisasi Program KOTAKU di Makassar sesuai dengan kompetensi SDM yang di butuhkan, (3) kepemimpinan yang baik sangat di butuhkan guna suksesnya implementasi strategi dari program yang di lakukan oleh pemerintah Kota Makassar yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berhasil tidaknya implementasi strategi pada program atau kegiatan ini tergantung dari pemimpin yang mengepalai kegiatan atau program ini. Pada program ini faktor Kepemimpinan sangat penting karena pada program ini melibatkan banyak SDM dari berbagai bidang yang harusnya saling mendukung untuk mencapai tujuan utama dari Program ini

yakni memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dalam menunjang program ini peran pemimpin sangat di butuhkan karena pemimpin adalah penentu keputusan termasuk dalam menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dengan bawahan sampai ke masyarakat yang wilayahnya menjadi sasaran program ini, (4) motivasi dalam implemntasi strategi dari program Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar sangat di butuhkan untuk menjaga dan menambah semangat kerja personil dan dapat di berikan dengan memberikan imbalan berupa kompensasi, kenaikan gaji, bonus, intensif, tunjangan, promosi, demosi, penghargaan, pujian, kritik, tanggung jawab lebih besar/ lebih kecil, dan penilaian prestasi, sehingga Program yang di canangkan Oleh pemerintah Kota Makassar mengenai Kota Tanpa Kumuh atau Program KOTAKU itu berjalan dengan baik, begitu pula pemimpin menjadi motifator kepada Masyarakat agar saling mendukung dalam mensukseskan Program ini karena dengan adanya masyarakat pelaksana program terbantu untuk menuntaskan Program ini. Melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan motivasi dan semangat untuk merubah daerah yang tertinggal atau kumuh menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirgantoro, Crown. 2001. *Manajemen Strategik Konsep, Implementasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Heene, Aime, dan Sebastian Desmidt. 2010. *Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Houthhoofd, N. 2001. *Bedrijfsmanahement. Strategie, structure en strijd*.Gent: Academica Press
- Hunger, J.D. dan Wheelen, T. L. (2012). *Strategic Manajement and BussinessPolicy: Toward Global Sustainability (13th Edition)*. New York:Pearson.
- Luankali,Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses pengambilan keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Taufiqurokhman, (2016:54) *Manajemen Strategik*. Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Tikson, Deddy T. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta.
- Usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.